

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN MODAL MANUSIA TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Ely Steven Ingratubun¹

Dosen STIE Umel

email: elysteveningratubun@gmail.com

Mastania²

Dosen STIE Umel

email: mastaniamanaf@gmail.com

Theo Julius Suryo Rahajaan³

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of government spending and human capital on poverty in Southeast Maluku Regency. This research uses quantitative descriptive analysis method with multiple linear regression statistical models with Standard Deviation Test, Determination Coefficient Test, Simultaneous Test with F-Test, Partial Test with T-Test. The type of data used in this study is quantitative data with secondary data sources. The results of this study found that there was an influence of variable X1 of 14.08 percent, variable X2 of 10.53 and Y variable of 52.25 percent. This study shows that government expenditure (X1), human capital (X2) has a positive and significant effect on poverty.

Keywords: Government expenditure, human capital, poverty.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengeluaran pemerintah dan modal manusia terhadap kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan model statistik regresi linier berganda dengan Uji Standar Deviasi, Uji Koefisien Determinasi, Uji Simultan dengan F-Test, Uji Parsial dengan T-Test. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif dengan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini yang ditemukan bahwa ada pengaruh variabel X1 sebesar 14,08 persen, variabel X2 sebesar 10,53 dan variabel Y sebesar 52,25 persen. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah (X1), human capital (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Kata kunci : Pengeluaran pemerintah, human capital, kemiskinan

I. PENDAHULUAN

Pembangunan sebuah proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 2000 : 20). Pembangunan juga diartikan sebagai suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk mencapai kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. (Rogers, 1983 : 25). Pada hakekatnya pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih serba baik, secara material maupun spritual (Todaro, 2000 : 20).

Suatu daerah harus disesuaikan dengan kondisi (masalah, kebutuhan, dan potensi) daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam tentang keadaan tiap daerah harus dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna bagi penentuan perencanaan pembangunan daerah yang bersangkutan (Arsyad, 1999).

Pembangunan merupakan suatu proses menuju perubahan yang diupayakan secara terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam konsep pembangunan terdapat makna alokasi sumber daya, regulasi, dan pemberdayaan masyarakat. Sumber daya

yang dimiliki seperti sumber alam, sumber daya manusia, sumber daya energi, sumber dana, dan lain-lain (Susetyo, 2011). Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, pembangunan diharapkan dapat mempermudah akses publik dalam memperoleh dan menikmati berbagai fasilitas yang mendasar seperti pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih, keamanan, serta menjamin ketersediaan infrastruktur yang memadai guna kelangsungan hidup masyarakat.

Kepadatan penduduk Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 99.086 jiwa penduduk yang tersebar di 11 kecamatan dan 190 desa yang dihuni tentu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan permasalahan serta beban pembangunan daerah yang dihadapi. Problematika penduduk yang kian bertambah sudah tentu berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan yang terjadi setiap periode waktu.

Kebijakan pemerintah pada sisi pengeluaran pemerintah guna menciptakan sumber daya manusia dalam hal ini modal manusia (*human capital*) terhadap kemiskinan merupakan salah satu isu pembangunan ekonomi di Kabupaten Maluku Tenggara dihadapi dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di daerah. Kabupaten Maluku Tenggara.

Kemiskinan merupakan sesuatu yang kompleks dalam arti kemiskinan bukan hanya disebabkan karena masalah kekurangan pendapatan dan harta (*lack of income and asset*), tetapi berkaitan dengan dimensi lain di luar ekonomi. Kemiskinan adalah masalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, masalah sandang, pangan dan papan, masalah lapangan pekerjaan, dan masalah ketidakpastian masa depan. Singkatnya, kemiskinan merupakan masalah serba kekurangan dan merupakan fenomena yang banyak

terjadi di daerah-daerah perdesaan pada umumnya dan sektor pertanian khususnya (Nanga, 2006).

Kemiskinan dapat ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Ikhsan (1999) faktor-faktor yang menjadi penentu kemiskinan yaitu, *pertama*, modal sumber daya manusia (*human capital*) yang diindikasikan dengan tingkat pendidikan, karena modal SDM merupakan faktor yang akan mempengaruhi kemampuan untuk memperoleh pekerjaan atau pendapatan. Secara umum semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin tinggi kemungkinan seseorang bekerja di sektor formal dengan pendapatan yang lebih tinggi. *Kedua*, modal fisik produktif yang meliputi luas lantai perkapita dan kepemilikan asset seperti lahan, khususnya untuk sektor pertanian, kepemilikan lahan akan menjadi faktor yang penting mengingat dengan tersedianya lahan yang produktif, seseorang dengan lapangan usaha pertanian akan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih baik. *Ketiga*, status pekerjaan, dimana status pekerjaan akan memberikan dampak bagi pola pendapatan seseorang.

Seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan pemerintah dalam rangka menjalankan ke-tiga peran tersebut, maka konsekuensinya pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang besar sebagai bentuk pengeluaran semua kegiatan pemerintah untuk menunjang berlangsungnya ke-tiga peran tersebut. Pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah dalam suatu wilayah. Kebijakan pemerintah dalam tiap pembelian barang dan jasa guna pelaksanaan suatu program mencerminkan besarnya biaya yang akan dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan program tersebut.

Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan

daerah merupakan kewenangan yang sangat strategis dan kedudukan yang strategis hal ini berkaitan dengan fungsinya selaku “pelayanan publik” guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan dan ketenteraman bagi masyarakat. Sebab perencanaan pembangunan daerah adalah suatu kegiatan untuk dilaksanakan dimasa depan dalam hal ini berawal dari tahapan-tahapan proses penyusunan program dan aktivitas yang melibatkan berbagai elemen didalamnya, demi pemanfaatan dan pengalokasian sumber-daya-sumber daya yang ada dengan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dalam suatu lingkungan atau wilayah yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu (Riyadi & Bratakusamah 2004: 8).

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Filmer & Pritchett (1997), Fan & Thorat (2000), Dollar & Kraay (2001), Bigsten & Levin (2001), Fan & Rao (2004), Laabas & Limam (2004), dan Klasen (2005) memperoleh hasil penelitian jenis pengeluaran pemerintah yang diidentifikasi mempunyai pengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap kemiskinan adalah pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, teknologi, perumahan, subsidi, dan transfer.

Pembangunan sumber daya manusia berkaitan dengan sejumlah dana yang dikeluarkan masa sekarang (saat pembangunan dilakukan) untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam meraih kesempatan memperoleh penghasilan lebih di masa mendatang. Imbalannya adalah tingkat penghasilan yang lebih tinggi, mencapai tingkat konsumsi yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Pembangunan manusia merupakan dampak dari pengembangan modal manusia. Sedangkan perbaikan dari modal

manusia itu sendiri tidak terlepas dari perbaikan kinerja ekonomi. Dengan kata lain antara perekonomian dan dampaknya terhadap pembangunan manusia memiliki hubungan yang kuat,

begitu pula sebaliknya akibat dari perbaikan kualitas manusia tersebut dalam jangka panjang akan menjadikan perekonomian meningkat (Munawwaroh, 2013).

TINJAUAN PUSTAKA

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah terdiri dari dua kelompok besar, rutin dan pembangunan. Pengeluaran rutin mencakup berbagai pengeluaran yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah, guna mendukung pelaksanaan program pembangunan. Disamping itu juga pengeluaran rutin juga menampung pos-pos yang berkaitan dengan berbagai pengeluaran. Untuk pengeluaran rutin mempunyai peranan dan fungsi yang cukup penting di dalam memperlancar roda pemerintahan. Hal ini terlihat dari peranan pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja pembelian inventaris, belanja pemeliharaan barang, belanja perjalanan dinas, dan belanja belanja lain bagi aparatur pemerintah.

Pemerintah menggunakan anggaran belanja untuk merencanakan dan mengontrol keadaan fisiknya. Anggaran belanja menunjukkan rencana pengeluaran dan program-program pemerintah dan penghasilan yang diharapkan dari sistem pajak selama tahun yang ditentukan. Anggaran belanja biasanya mengandung daftar program-program spesifik (pendidikan, kesejahteraan, pertahanan, dll) dan juga sumber-sumber pajak (pajak pendapatan, pribadi, pajak asuransi sosial, dll). Anggaran belanja pemerintah memiliki dua fungsi ekonomi utama yaitu sebagai sebuah alat yang dapat digunakan pemerintah untuk mengatur prioritas nasional, mengalokasikan output nasional di antara konsumsi umum, pribadi dan investasi. Penyediaan berbagai macam

barang dan jasa konsumsi publik yang dibiayai oleh pajak bagi kelompok penduduk yang paling miskin, merupakan instrumen lain yang cukup berpotensi untuk mengentaskan kemiskinan. Sebagai contoh: pengadaan proyek-proyek perbaikan fasilitas-fasilitas kesehatan publik di daerah – daerah pedesaan serta pinggiran dan pusat pemukiman kumuh di kota-kota, pembangunan tangki-tangki air bersih, serta pengadaan listrik di daerah-daerah terpencil (Todaro, 2006).

Modal Manusia

Modal manusia memiliki peran penting dalam penciptaan nilai ekonomi dan bisnis (McGregor dkk. 2004; Karami dkk. 2006). Modal manusia meliputi semua proses yang mampu memicu tingkat pengetahuan yang lebih tinggi dan melahirkan pengusaha yang kompetitif dan mampu menjalankan bisnis dengan lebih baik. Faktor kemampuan dan keterampilan modal manusia yang berkualitas diperlukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan terutama dalam industri kecil dan menengah (Skuras 2005). Oleh karena itu, pembangunan manusia harus dilakukan agar kualitas manusia dapat ditingkatkan untuk kepentingan pembangunan ekonomi khususnya melalui peningkatan kualitas SDM industri.

Konsep modal manusia menurut pandangan modern mulai dipelopori oleh Schultz (1960) dan Becker (1964). Dalam perkembangannya, konsep modal manusia dapat dijelaskan sebagai kemampuan atau kapasitas baik sejak lahir atau keturunan maupun

pengumpulan yang dibentuk selama usia bekerja secara produktif diikuti dengan bentuk-bentuk modal atau input lain yang bertujuan untuk mencapai kemapanan ekonomi. Definisi lain menyebutkan secara lebih spesifik konsep modal manusia pada dasarnya adalah pendidikan atau intelektual, keterampilan dan pengalaman kerja (Yan dkk. 2003). Istilah modal manusia selanjutnya pada umumnya didefinisikan sebagai akumulasi pendidikan, termasuk pengetahuan dan keterampilan pada usia kerja yang terkumpul melalui pendidikan formal, pelatihan dan pengalaman.

Kajian tentang pencapaian kualitas SDM pengusaha mulai mendapat perhatian oleh pemerintah di berbagai negara. Seperti terjadi di Amerika Serikat dari penelitian Bates (2005) telah membuktikan bahwa meskipun industri kecil mendapat pemberian modal (*kapitalisasi*) yang besar saat memulai bisnis (*start-up*), namun tetap gagal karena diyakini akibat pengaruh pencapaian yang lebih rendah dalam pendidikan dan pengalaman spesifik bidang bisnis yang digeluti. Demikian juga pada industri kecil di Indonesia, berbagai bentuk bantuan modal dan insentif telah diberikan oleh pemerintah Indonesia, namun semuanya tidak memberikan hasil yang menggembarakan (Thee 2006).

Kemiskinan

Menurut World Bank dalam Kumalasari (2011), mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan, dan terdiri dari banyak dimensi. Ini termasuk berpenghasilan rendah dan ketidakmampuan untuk mendapatkan barang dasar dan layanan yang diperlukan untuk bertahan hidup dengan martabat. Kemiskinan juga

meliputi rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, akses masyarakat miskin terhadap air bersih dan sanitasi, keamanan fisik yang tidak memadai, kurangnya suara, dan kapasitas memadai serta kesempatan untuk hidup yang lebih baik itu.

Kemiskinan menurut BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mengukur kemiskinan. Pendekatan ini dihitung menggunakan Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Jadi, dalam pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Menurut Levitan dalam Badruddin (2009), mengemukakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Selain Levitan, menurut Friedman yang juga dalam Badruddin (2009), mengemukakan bahwa kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan basis kekuasaan sosial, yang meliputi: asset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan), sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai), organisasi sosial politik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan Kabupaten Maluku Tenggara. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode pengambilan data secara panel data atau data sekunder dalam bentuk time series.

Metode Analisa Data

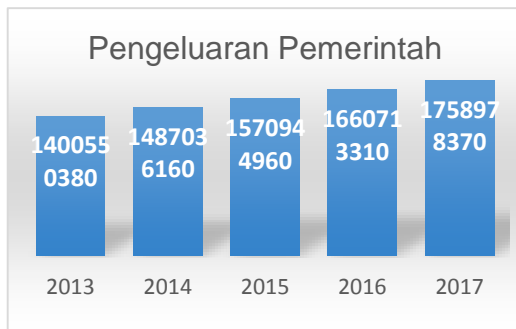
Metode analisa data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif untuk mendiskripsikan setiap variabel yang diteliti sedangkan untuk menguji hipotesis menggunakan pendekatan model analisis regresi linier berganda.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang dituangkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) per tahun, di anggarkan pada semua PDRB (sektor primer, sekunder dan tertier) setiap tahun anggaran guna menekan angka kemiskinan, yang tercermin dalam dokumen APBD Kabupaten Maluku Tenggara pada lima tahun terakhir sesuai hasil analisis dalam miliaran rupiah.



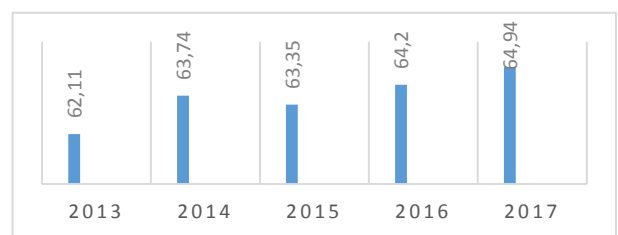
Sumber data: BPS Maluku Tenggara. Tahun 2017

Jumlah pengeluaran pemerintah dalam kurung waktu tahun 2013-2017 mengalami kenaikan secara terus menerus yang dikarenakan karena kebutuhan pembangunan yang begitu kompleks sehingga pembiayaan pun meningkat dari tahun ketahun. Adapun ini merupakan

salah satu konsumsi biaya yang dikeluarkan pemerintah yang dianggarkan dan dialokasikan untuk pembangunan ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara lewat sektor-sektor ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan laju angka kemiskinan pada Kabupaten Maluku Tenggara.

1. Modal Manusia (*Human Capital*)

Modal manusia (*human capital*) yang merupakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Maluku Tenggara yang perlu di dorong dan dipacu guna menekan angka kemiskinan lima tahun terakhir di Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan hasil analisis perhitungan pada tabel dibawah ini :



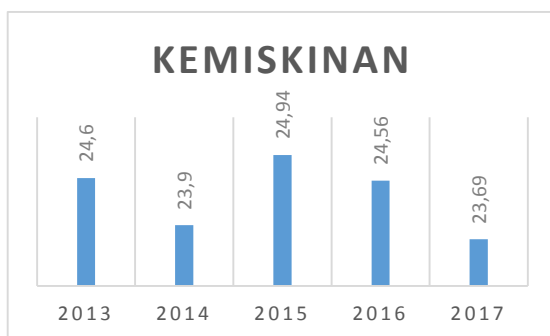
Sumber: BPS Maluku Tenggara Tahun 2017

Pada dasarnya IPM merupakan indeks yang diharapkan mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia sehingga dapat dibandingkan antar wilayah atau bahkan antar waktu. Angka IPM di Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan suatu peningkatan. Terlihat bahwa angka IPM

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2013, IPM yang dicapai sebesar 62,11. Di tahun 2014 menurun menjadi 61,74 dan kembali meningkat menjadi 63,35 di tahun 2015, kemudian pada tahun 2016 menjadi 64,20 dan meningkat lagi menjadi 64,94 pada 2017

2. Kemiskinan

Dalam lima tahun terakhir, persentase penduduk miskin di Maluku Tenggara secara perlahan mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin berkurang 0,94 persen pada 2017 dibandingkan 2016. Dari segi jumlah, penduduk miskin di Maluku Tenggara mengalami penurunan pada 2017 sekitar 0,87 ribu orang.



Sumber: BPS Maluku Tenggara

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi dan lebih banyak ditemukan di daerah perdesaan. Dibandingkan tahun sebelumnya, pada 2017 kemiskinan di Maluku Tenggara semakin menurun, dari 24,56 persen pada 2016 menjadi 23,69 persen. Hal ini tidak lepas dari program-program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah.

Uji Standar Deviasi

Tabel 1
Output Regresi yang dihasilkan
Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Ykemiskinan	24.3380	.52251	5
X1PengeluaranPemerintah	157564463.6000	14087182.54090	5
X2IPM	63.6680	1.05293	5

Sumber : Data diolah program IBM SPSS version 23

Pada Tabel 1 Output regresi yang dihasilkan pada analisis *descriptive statistics* menjelaskan bahwa hasil *uji standar deviasi* pada variabel Y (kemiskinan), dimana hasil output regresi yang diperoleh yang diperoleh sebesar 0.52251 atau 52,25%. Artinya bahwa kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara sangat berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan pengaruh variabel X1 (pengeluaran pemerintah) dari sisi pembelajaran publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan sebesar 1.4087 atau 14,08%. Ini berarti bahwa jika semakin besar pengeluaran pemerintah (pembelajaan publik) sebesar 1 persen akan berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara akan turun sebesar sebesar 1.4%.

Pada variabel X2 (Indeks Pembangunan Manusia) berpengaruh positif dan signifikan melalui pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 1.05293 atau 10,53%. Ini berarti bahwa jika IPM naik sebesar 1 persen, berpengaruh terhadap kemiskinan turun sebesar 1,0%.

Dengan demikian *uji standar deviasi* sebagai output regresi yang dihasilkan bertujuan untuk mengetahui masing-masing output nilai regresi secara rata-rata yang diperoleh dari nilai rata-rata variabel X1 (Pengeluaran Pemerintah), X2 (Index Pembangunan Manusia), berpengaruh terhadap variabel Y (Kemiskinan) Kabupaten Maluku Tenggara.

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independent X1 (pengeluaran pemerintah), X2 (IPM), terhadap variabel dependent Y (kemiskinan). dapat dilihat pada tabel 1.5 dibawah ini.

Tabel 2 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df 1	df 2	Sig. F Change	
1	.774 ^a	.598	.197	.46824	.598	1.491	2	2	.402	1.517

a. Predictors: (Constant), X2IPM, X1PengeluaranPemerintah

b. Dependent Variable: Ykemiskinan

Pada Tabel 2 uji koefisien determinasi dengan *Model Summary* menjelaskan bahwa nilai koefisien determinasi terletak pada tabel *Model Summary* atas nilai *R Square*. Namun untuk menganalisis hasil regresi linier berganda dengan metode *model summary*, maka peneliti menggunakan nilai *R Square* yang sudah disesuaikan dengan *Adjusted R Square*, karena disesuaikan dengan jumlah variabel X1 (pengeluaran pemerintah), X2 (IPM) dan Y (kemiskinan) *variable* yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi nilai *R²* sebesar 0.774 dan nilai *R Square* yang diperoleh sebesar 0.598, jika nilai *R²* di atas 0,05 karena nilai *R Square* berkisar antara 0 sampai 1, ini berarti bahwa nilai koefisien determinasi pada variabel X1 (pengeluaran pemerintah) dan X2 (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y (kemiskinan) di Kabupaten Maluku Tenggara, sedangkan nilai *Adjusted R Square* yang dihasilkan sebesar 0.197. Artinya nilai koefisien determinasi sebesar 19,7%, dimana variabel Y (kemiskinan) dapat dipengaruhi langsung variabel X1 (pengeluaran pemerintah) dan X2 (IPM). Sedangkan nilai *standar error of the estimate* sebesar 0.46824 atau 46,82% merupakan nilai koefisien determinasi X1 (pengeluaran pemerintah) dan X2 (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara.

Untuk nilai signifikans *F-Change* dari uji koefisien determinasi adalah

sebesar 1.491 atau 14,91%. Ini menunjukkan bahwa jika pengeluaran pemerintah dan IPM meningkat sebesar 1%, berpengaruh terhadap kemiskinan turun sebesar 1,4%. Pada uji koefisien determinasi dari nilai *durbin watson* sebesar 1.517 atau 15,17% berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara.

Penerimaan dan Penolakan Hipotesis (Hipotesis H0 dan H1).

Pedoman model analisis yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis adalah, jika hipotesis nol (Ho) yang diusulkan :

- Ho diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, atau nilai *p-value* pada kolom *sig* > *level of significant* (α).
 - Ho ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau nilai *p-value* pada kolom *sig* < *level of significant* (α).
- Pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis jika alternatif (Ha) yang diusulkan.
- Ha diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau nilai *p-value* pada kolom *sig* < *level of significant* (α).
 - Ha ditolak jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, atau nilai *p-value* pada kolom *sig* > *level of significant* (α).

Uji Simultan dengan F-Test

Tabel 3. Uji Simultan dengan F-tes

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.654	2	.327	1.491	.402 ^b
	Residual	.438	2	.219		
	Total	1.092	4			

a. Dependent Variable: Ykemiskinan

b. Predictors: (Constant), X2IPM, X1PengeluaranPemerintah

Pada tabel 3 secara simultan dengan pengujian *F-tes* menjelaskan bahwa uji *simultan* dengan *F-test* ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara *simultan* (bersama-sama) variabel X1 (pengeluaran pemerintah) dan X2 (IPM) terhadap variabel Y (kemiskinan).

Pada hasil nilai *F-test* ini pada hasil output perhitungan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda pada program aplikasi IBM SPSS version 23.0 dapat dilihat pada tabel ANOVA di atas. Hasil nilai *F-test* menunjukkan bahwa variabel *independent* dari variabel X1 dan X2 secara *simultan* berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y (kemiskinan), jika nilai *p-value* sebesar 1.491 lebih besar dari *level of significant* yang ditentukan atau *F-hitung* sebesar 0.402^b lebih kecil dari *F-tabel*. Sehingga *F-tabel* dihitung dengan cara $df1 = 5-1 = 4$ dan $df2 = 5-3 = 2$ adalah jumlah variabel dependent Y (kemiskinan) yang dipengaruhi variabel X1 (pengeluaran pemerintah) dan X2 (IPM).

Jadi hasil analisis output regresi linier berganda dengan program aplikasi IBM SPSS versi 23.0 tersebut menunjukkan bahwa *p-value* 1.491 > 0,05, artinya *significant*, sedangkan *F-hitung* 0.402 < dari *F-tabel* 4,07 artinya *significant* ($df1 = 5-1 = 4$ dan $df2 = 5-3 = 2$). *Signifikan* di sini, berarti H1 diterima dan Ho ditolak. Artinya, pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagai variabel X1 dan variabel X2 (IPM), secara *simultan* berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara.

Uji Parsial dengan T-Test

Tabel 4 Koefisien Regresi

		Coefficients ^a												
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error				Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
		1	(Constant)	72.090	30.241		2.384	.140	-58.025	202.205				
	X1PengeluaranPemerintah	4.5558	.000	1.228	1.069	.397	.000	.000	.373	.603	.479	.152	6.579	
	X2IPM	-.863	.570	-1.739	-1.513	.270	-3.317	1.591	.608	.730	.678	.152	6.579	

a. Dependent Variable: Ykemiskinan

Pada Tabel 4 menjelaskan bahwa nilai koefisien regresi yang diperoleh dalam persamaan uji *parsial* dengan *T-test*

tersebut dapat diinterpretasikan atau diuraikan sebagai berikut dibawah ini :

1. Nilai Constanta (α) = 72.090

Nilai *constant* (α) sebesar 72.090 atau 72,09%, menyatakan bahwa jika variabel-variabel tersebut yang terdiri dari variabel X1 (pengeluaran pemerintah) dan variabel X2 (IPM) secara analisis statistik uji parsial dengan model *T-test* berpengaruh positif dan signifikan secara *parsial* terhadap kemiskinan. Jadi variabel X1 (pengeluaran pemerintah) dan X2 (IPM) secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 72,09%.

2. Nilai $\beta_1 = 4.5558$

Nilai koefisien regresi β_1 ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah diperoleh sebesar 4.5558 atau 45,56% merupakan variabel β_1 berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan turun sebesar 1 persen. Artinya jika pengeluaran pemerintah (X1) semakin besar akan berpengaruh secara *parsial* terhadap kemiskinan (Y). Jadi pengeluaran pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara peningkatan sebesar 45,56%.

3. Nilai $\beta_2 = 0.863$

Nilai koefisien regresi β_2 ini menunjukkan bahwa X2 (IPM) nilai yang diperoleh sebesar 0.863 atau 86,3% yang merupakan variabel β_2 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y (kemiskinan). Artinya jika Modal Manusia naik sebesar 1%, berpengaruh secara *parsial* terhadap kemiskinan turun sebesar 0,863 atau 86,3% di Kabupaten Maluku Tenggara.

Persamaan Model Regresi Linier Berganda

Berdasarkan output program IBM SPSS version 23.0 pada Coefficients^a maka model persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = 72.090 (\alpha) + 4.5558 (X1) + 0.863 (X2)$$

Interpretasi dari model persamaan regresi linier berganda dibawah ini adalah sebagai berikut :

- a. Jika terjadi kenaikan variabel X1 (pengeluaran pemerintah) pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 1% akan berpengaruh terhadap kemiskinan meningkat sebesar 4.5558 atau 45,56% dan sebaliknya.
- b. Jika terjadi kenaikan variabel X2 (IPM) sebesar 1%, akan berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara turun sebesar 0.863 atau 86,3% dan sebaliknya.
- c. Jika terjadi kenaikan variabel X1 (pengeluaran pemerintah) dan variabel X2 (IPM) secara *parsial* maupun *simultan*, akan berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara.

Pembahasan

Pengeluaran pemerintah dari sisi pembelanjaan publik rata-rata hanya 1 persen dari tahun 2013 sampai pada tahun 2017, hal ini tidak menunjukkan perubahan pengeluaran pemerintah yang signifikan per tahun, sehingga pengaruhnya negatif dan non signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara. Sebaliknya mengenai dampak kebijakan publik adanya pengeluaran pemerintah pada sisi belanja publik menunjukkan dampak pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Laabas dan Limam (2004) meneliti dampak pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan, ketimpangan, dan pertumbuhan di negara-negara Arab (Mesir, Yordania, Maroko, Mauritania, Tunisia, Yaman, dan Aljazair) selama tahun 1988-1999. Kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini relatif lebih komprehensif dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, karena tidak hanya mengamati dampak pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan, tetapi juga dampak simultan pengeluaran

pemerintah terhadap pertumbuhan, ketimpangan dan kemiskinan. Kesimpulan yang dihasilkan oleh penelitian ini adalah bahwa, pengeluaran pemerintah memberi dampaknya terhadap kemiskinan secara tidak langsung melalui dampaknya terhadap distribusi pendapatan dan rata-rata pengeluaran.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan IPM antara 0,5 sampai 1 persen kenaikan dan cenderung berfluktuasi bahkan ada pengaruh positif dan signifikan namun lemah, sebaliknya berpengaruh negatif dan non signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara. Berdasarkan perkembangan IPM sesuai grafik di atas, belum memiliki pengaruh kuat terhadap penurunan kemiskinan, khususnya pada masyarakat perdesaan maupun masyarakat perkotaan pinggiran. Hal ini tersebut berdampak signifikan melalui bidang pendidikan dan kesehatan belum di optimalkan secara totalitas dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Penyempurnaan indikator kesejahteraan masyarakat terus menerus dilakukan hingga muncul gagasan menggunakan *Physical Quality of Life Index (PQLI)* yang merupakan indikator kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan kecukupan sandang, pangan, dan perumahan. Dalam perkembangannya, indikator kesejahteraan masyarakat (PQLI) belum memuaskan, karena tingkat pendapatan, kecukupan sandang, pangan, dan perumahan belum dapat dijadikan indikator kesejahteraan masyarakat (Arsyad, 2004). karena tingkat pendapatan, kecukupan sandang, pangan, dan perumahan belum dapat dijadikan indikator kesejahteraan masyarakat (Arsyad, 2004). Untuk menyempurnakan PQLI yang belum dapat dijadikan indikator kesejahteraan masyarakat, maka *United Nations Development Program*

(UNDP) mengenalkan formula *Human Development Index* (HDI) atau disebut pula dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 1990 sebagai suatu proses perluasan pilihan umat manusia dalam meningkatkan kesempatan mereka memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, penghasilan, dan pekerjaan. Salah satu alat ukur atau indikator yang dapat dipakai untuk melihat perkembangan kualitas sumber daya manusia sehingga berada pada tingkat keberhasilan pembangunan yaitu *Human Development Indeks* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (daya beli). Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut, akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup manusia.

Pada angka kemiskinan sesuai grafik di atas, menggambarkan bahwa kondisi kemiskinan berfluktuatif dari tahun ke tahun dengan rata-rata peningkatan dan penurunan berkisar 0,5 sampai 1 persen yang terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa ada indikator-indikator ekonomi yang belum tercapai dan terpenuhi atas kebutuhan dasar (*basic needs*) sandang,

pangan, papan, perumahan, pendidikan dan kesehatan belum tersentuh secara merata di masyarakat miskin perkotaan dan perdesaan.

Menurut studi Bank Dunia (2001), setiap kenaikan 10 persen pendapatan per kapita riil akan mengurangi indeks kemiskinan 1,3 persen, dan pada saat yang sama, setiap kenaikan 10 persen harga riil beras menyebabkan peningkatan angka kemiskinan 3,2 persen. Namun jika dilihat dari aspek yang lain, temuan penelitian ini berbeda secara kontras dengan hasil studi tersebut, dimana Dollar dan Kraay (2001) menemukan bahwa kebijakan yang dipersepsi sebagai pro-kemiskinan (*pro-poor policies*), seperti pengeluaran publik untuk pendidikan dan kesehatan, ternyata tidak mempunyai dampak signifikan terhadap pendapatan kelompok miskin. Hasil penelitian ini justru memperlihatkan gambaran yang sebaliknya, dimana pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan justru merupakan kebijakan yang pro-kemiskinan (*pro-poor policies*), seperti halnya hasil studi Fan, Hazell, dan Thorat (1999), dan Fan, Zhang, dan Zhang (2002).

Kesimpulan

Mengacu pada hasil penelitian dan pembahasan dimaksud, maka penulis memberikan kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.
2. Modal manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln, 1999, *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE.
- Bank Dunia, 2001. Hasil Research Pendapatan Per Kapita Masyarakat Miskin.
- Badan Pusat Statistik. 2011. Berita Resmi Statistik Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku.
- BPS 20016 Kabupaten Maluku Tenggara.
- Badrudin, Syamsiah. 2009. *Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial Di Indonesia Pra Dan Pasca Runtuhnya Orde Baru*.
- Bigsten, A. & Levin, J. (2001). Growth, Income Distribution and Poverty. *Working Paper in Economic*.
- Becker, Gary S. 1993. Human Capital. Third Edition. The University of Chicago Press. Chicago
- Baltagi, B.H., (2005). *Econometric Analysis of Panel Data*. Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 4th edition.
- Canning David, and Peter Pedroni. "Infrastructure and long run economic growth." University of Belfast. 2004
- Creswell, John W. (1994). *Research Design. Qualitative, Quantitative Approaches*. London. Sage Publication.
- Dollar, D. & Kraay, A. (2001). *Trade, Growth and Poverty*. Development Research Group, The World Bank.
- Dollar, David and Aart Kraay. 2001. Trade, Growth, and Poverty. Policies Research Working Paper #2615. World Bank. Retrieved January 9, 2005 from <http://are.berkeley.edu/harrison/globalpoverty/>.
- Fan, S. Zang. & Rao, N. (2004). *Public Investment, Growth and Rural Poverty*. Public Expenditures, Growth and Poverty: Lesson from Developing Countries. Hal. 56-108. International Food Policy Research Institute.
- Fan, S., Hazell, P. & Thorat, S. (2000). *Government Spending, Growth and Poverty in Rural India*. Amer. J. Agr. Econ. 82 (4) (November 2000): 1038-1051. American Agricultural Economics Assosiation.
- Fan, S., L. Zhang, and X. Zhang. 2002. Growth, Inequality, and Poverty in Rural China: The Role of Public Investments. IFPRI Research Report 125. Washington D.C. Retrieved Februari 9, 2005 from <http://web.worldbank.org/wbsite/external/topics/extpovert/extpgi/>.
- Filmer, D. & Pritchett, L. (1997). *The Impact of Public Spending of Health : Does Money Matter?*. Social Sience & Madicine. 49:1309- 1323.
- Guritno Mangkoesobroto. 2001. *Ekonomi Publik*, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Hsiao, C, 2003, *Analysis of Panel Data*, Cambridge University Press, New York.
- Imam Ghozali, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. BPUndip: Semarang.
- Hagenaars A. 1997 dan Vos 1997 *The Definition and Measurement of Poverty*. The Journal of Human Resources.
- Kaufman, Bruce, 2000, *The Economics of Labor Markets*, Fifth Edition, The Dryden Press, New York.
- Kankwenda, M. L. Kk 2000 *Poverty Eradication : Were Stands Africa*.

- Economica*, London.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: YKPN.
- Klasen. (2005). *Economic Growth And Poverty Reduction: Measurement and Policy Issues*. OECD Development Centre. Working Paper No.246.
- Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. <http://jdih.bpk.go.id>
- Kumalasari, Merna. 2011. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Kodoatie, R.J., (2003). *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Laabas dan Limam. 2004. *Impact of Public Policies on Poverty, Income Distribution and Growth*. IFPRI/API Collaborative Research Project: *Public Policy and Poverty Reduction in the Arab Region*.
- Mankiw. 2003. *Pengantar ekonomi*, Erlangga. Jakarta.
- Mangkusobroto, Guritno, 1993, *Ekonomi Publik*, LP FE-UI, Jakarta.
- Mudrajad Kuncoro. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Rasyid Ryaas. (2002). Otonomi Daerah Dalam Kesatuan*. penerbit Yogyakarta.
- Riyadi & Deddy Bratakusumah. (2003). *Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah)*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Syahyuti. 2006. *30 Konsep Penting Dalam Pembangunan Pedesaan dan Masalah, dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN.
- _____. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perekonomian, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Mankiw, N.Gregory, (2001). *Principles of Economics*, (Alih bahasa: Aris Munandar), Erlangga, Jakarta.
- Mankiw NG. 2007. *Makroekonomi*. Edisi keenam. Jakarta: Erlangga.
- Mubyarto, 1994 *Kiat memerangi kemiskinan* Tempo edisi No 11 Tahun XXIII. Penerbit PT Graviti Press, Jakarta.
- Marzuki, 2005, dan Kharisma 2007 *Metodologi Riset*. Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.
- Nanga, Muana. 2001. *Makroekonomi Teori, Masalah dan Kebijakan Edisi Perdana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- O, Boyle, E.J. 1998 *Transition Info and Out of Poverty*. International Journal of Social Economics.
- Permendagri Nomor 29 Tahun 2002 dan Nomor 13 Tahun 2006
- Ravallion, M. and B. Bidani. 1997, *Decomposing Social Indicators using Distributional Data*. *Journal of Econometrics* Vol. 77: 125-139.
- Romer P. 1986, *Increasing Returns and Long-Run Growth*. *Journal of Political Economy* 94(5): 1002-1037.
- Rogers E. M. 1983. *Modernization Among Peasant : The Impact of Communication*. New York. Holt, Rinehart, and Wiston.
- Pertanian*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Salemba Empat.
- Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta : Rajawali Pers.

- Suryawati, Criswardani. 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. http://www.jmpk-online.net/Volume_8/Vol_08_No_03_2_005.pdf.
- Stiglitz, E. Joseph. 1986. *Economic of Public Sector*. New York: WW Norton and Company.
- Stiglitz, Joseph. (2000). *Economics of The Public Sector*. 3rd Edition. New York: W.W. Norton and Company.
- Suryanto S, 1995 *Role of land Tenure in Adopting Agroforestry and Reducing Wild Fire in a Forests Zone in Lampung – Sumatra Agroforestry System*.
- Sukirno, 2004, *Ekonomi Pembangunan*, Penerbit LP FE-UI, Jakarta.
- Sukirno, Sadono, (1994). *Pengantar Makro Ekonomi*, Edisi Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sonny Sumarsono, 2003, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, Zelensky 1996 *Karakteristik penduduk Manusia Dan Ketenagakerjaan*. Penerbit Grahallmu, Jember. Bonar MWignjosubroto 2006 dan Kharisma (2007) “ *Kemiskinan structura masalah dan kebijakan*
- Todaro, Michael. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi ke-7 (Terjemahan Bahasa Indonesia). Jakarta. PT Erlangga.
- Todaro MP dan Smith SC. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Widodo, Joko. (2007). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Banyumedia Publishing, Malang Jawa Timur.
- World Bank. 2007. *Ikhtisar Kajian Pengeluaran Publik Indonesia: Memaksimalkan peluang Baru: Kajian Pengeluaran Publik Indonesia*. Februari.
- World Bank. 1994. *World Development Reports: Infrastructure for Development*. New York: Oxford University Press.